Buku Informasi Data

PROGRAM PENYIAPAN DAN PENGEMBANGAN **KEPALA SEKOLAH**





Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah 2018

BUKU SAKU LPPKS

Edisi 4 Tahun 2018

Buku Saku ini berisi :

- PESERTA PROGRAM PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH
- PESERTA PROGRAM PENGUATAN KEPALA SEKOLAH
- PENERIMA SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (STTPP) TEREGISTRASI
- KEPALA SEKOLAH YANG MEMILIKI SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (STTPP) TEREGISTRASI
- 5 LEMBAGA PENYELENGGARA DIKLAT (LPD)
- 6 SEBARAN STTPP TEREGISTRASI DI WILAYAH PROVINSI
- 7 ASESOR PROGRAM PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH (PPCKS)
- PENGAJAR DIKLAT PROGRAM PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH (PPCKS)
- 9 PENGAJAR DIKLAT PROGRAM PENGUATAN KEPALA SEKOLAH
- SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN

Kontributor:

Data Pokok Pendidik (DAPODIK)

LPPKS

LPD Se-Indonesia

Dinas Kabupaten/Kota Se-Indonesia

Diterbitkan oleh LPPKS @2018

Sumber data : Ippks.kemdikbud.go.id/nuks Cut off per 13 November 2018

SAMBUTAN KEPALA LPPKS



Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd.Kepala LPPKS

Era industri 4.0 merupakan era teknologi dan informasi termutakhir saat ini, dimana era ini ditandai dengan derasnya arus informasi yang meliputi semua bidang kehidupan termasuk bidang pendidikan. Derasnya arus informasi tersebut membawa dampak positif terhadap dunia pendidikan karena ikut mendorong berbagai pihak yang menaungi bidang pendidikan untuk mengambil manfaat dari perkembangan teknologi dan informasi. Pengelolaan data informasi tentang pendidikan, terkhusus kepala sekolah dapat di management dengan rapi dan dipergunakan untuk berbagai kepentingan dengan dukungan data yang valid dan mutakhir. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut terutama dimaksudkan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dan memperbaiki prosedur kerja secara berkala.

Informasi tentang kepala sekolah yang disajikan dalam buku saku ini berguna dalam menentukan arah kebijakan pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah. Ketersediaan informasi tentang kepala sekolah dan perkembangan teknologi haruslah mempermudah akses pada dunia pendidikan termasuk dunia kepala sekolah. Penentuan kebijakan yang tepat tentang pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah diyakini merupakan tindakan strategis karena akan membawa perubahan besar di dunia pendidikan sebab hanya kepala sekolah hebat yang dapat membina guru-guru menjadi guru hebat, yang pada gilirannya akan mampu melahirkan generasi emas pada tahun 2045 sebagaimana yang dicita-citakan oleh pemerintah.

Terima kasih kepada Kepala Seksi Sistem Informasi Bapak Wiyono, M.Pd yang sudah berinisiatif untuk menyusun buku saku ini, juga kepada Bapak Drs. I Nyoman Rudi Kurniawan, M.T., selaku Kepala Sub Bagian Umum yang terus mendorong penerbitannya. Terima kasih kepada Kepala Seksi Peningkatan Kompetensi Ibu Medira Ferayanti, M.A., yang telah memberikan data akurat tetang kepala sekolah yang telah mengikuti Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (PPCKS) dan pemilik sertifikat kepala sekolah teregistrasi. Penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada seluruh kepala PPPPTK, LP3KPTK, LPMP, BKD, dan Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten/Kota, juga kepada seluruh Bupati dan Walikota serta Gubernur yang telah mendukung pelaksanaan PPCKS dimana data tentang PPCKS tersebut menjadi baseline untuk perencanaan berbagai kegiatan yang menyangkut penilaian kinerja dan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Semoga buku saku ini membawa manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia terutama bagi para penentu kebijakan yang menyangkut kepala sekolah.

Karanganyar, 22 November 2018

Kepala LPPKS

Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	•
Sambutan Kepala LPPKS	ii
Daftar Isi	. 1
Bagian 1. Peserta Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (PPCKS)	. :
Bagian 2. Peserta Program Penguatan Kepala Sekolah	. 4
Bagian 3. Penerima Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan (STTPP)	
Teregistrasi A. Data STTPP Teregistrasi berdasarkan Jenis Kelamin	. 8
Bagian 4. Kepala Sekolah Yang Memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan (STTPP) Teregistrasi	
Bagian 5. Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD) Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD)	1 :
Bagian 6. Sebaran STTPP Teregistrasi Di Wilayah Provinsi A. Perbandingan Sebaran STTPP Teregistrasi di Wilayah Provinsi B. Provinsi dengan sebaran STTPP Teregistrasi di semua Kabupaten/Kota C. Provinsi yang Sebagian Kabupaten/Kota yang telah mengikuti Program Penguatan Calon Kepala Sekolah (PPCKS) D. Jumlah STTPP di masing-masing wilayah Provinsi E. Perbandingan sebaran STTPP Teregistrasi di Kabupaten/Kota	18 19 20 22
Bagian 7. Asesor Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (PPCKS)	2
Bagian 8. Pengajar Diklat Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (PPCKS) A. Sebaran Pengajar Diklat PPCKS Berdasarkan Wilayah B. Sebaran Pengajar Diklat Berdasarkan Profesi	3

Bagian 9. Pengajar Diklat Program Penguatan Kepala Sekolah	3
Bagian 10. Sosialisasi Peraturan-Peraturan	4
A. PP 19/2017 tentang Perubahan PP 74/2008 tentang Guru	
B. Syarat Guru untuk menjadi Kepala Sekolah	
C. Penyiapan Calon Kepala Sekolah	4
D. Seleksi Calon Kepala Sekolah	4
E. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah	4
F. Proses Pengangkatan Kepala Sekolah	
G. Alur PPCKS	
H. Penugasan Kepala Sekolah	
I. Tugas Pokok Kepala Sekolah	4
 Bagian 11. Lampiran Dasar Hukum A. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 B. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 C. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 D. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 212/P/2018 E. Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19732/B.B1.3/HK/2018 F. Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian 	5 5 5
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23195/B.b13/Hk/2018	5
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18356 Tahun 2018	5

Peserta Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (PPCKS)

A. Peserta Seleksi Substansi



Grafik 1. Jumlah Peserta Seleksi Substansi

B. Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)



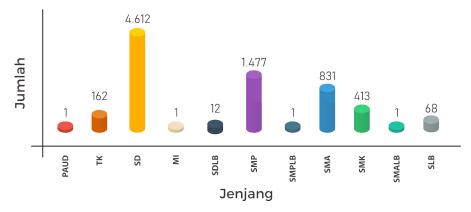
Grafik 2. Jumlah Peserta Diklat



A. Jumlah Peserta Diklat Program Penguatan Kepala Sekolah Berdasarkan Jenjang

Tabel 1. Jumlah Peserta Diklat Program Penguatan Kepala Sekolah Berdasarkan Jenjang

NO	JENJANG SEKOLAH	JUMLAH
1	PAUD	1
2	тк	162
3	SD	4.612
4	MI	1
5	SDLB	12
6	SMP	1.477
7	SMPLB	1
8	SMA	831
9	SMK	413
10	SMALB	1
11	SLB	68
	TOTAL	7.579



Grafik 3. Progres Kumulatif Jumlah Peserta Diklat Program Penguatan Kepala Sekolah Berdasarkan Jenjang

B. Jumlah Peserta Diklat Program Penguatan Kepala Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2. Jumlah Peserta Diklat Program Penguatan Kepala Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin

NO JENIS KELAMIN		JUMLAH
1	Laki-Laki	4.750
2	Perempuan	2.829
	TOTAL	7.579



Grafik 4. Persentase Jumlah Peserta Diklat Program Penguatan Kepala Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin

Penerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Teregistrasi

A. Data STTPP Teregistrasi berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3. STTPP Teregistrasi Terbit berdasarkan Jenis Kelamin

NO JENIS KELAMIN		JUMLAH
1	Laki-Laki	23.872
2	Perempuan	19.316
	TOTAL	43.188

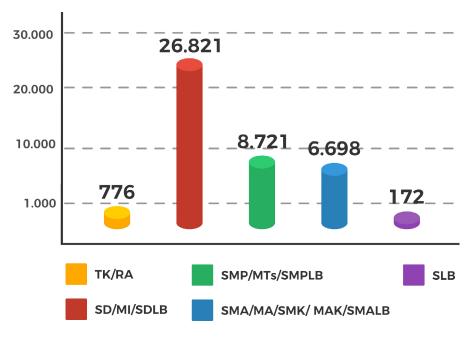


Grafik 5. Persentase STTPP Teregistrasi Terbit berdasarkan Jenis Kelamin

B. STTPP Teregistrasi Terbit berdasarkan Jenjang Sekolah

Tabel 4. STTPP Teregistrasi Terbit berdasarkan Jenjang Sekolah

NO	JENJANG SEKOLAH	JUMLAH
1	TK/RA	776
2	SD/MI/SDLB	26.821
3	SMP/MTs/SMPLB	8.721
4	SMA/MA/SMK/MAK/SMALB	6.698
5	SLB	172
	TOTAL	43.188

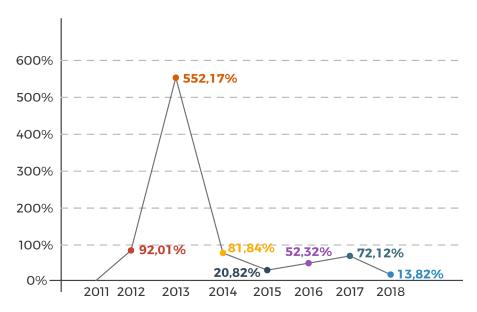


Grafik 6. STTPP Teregistrasi Terbit berdasarkan Jenjang Sekolah

C. Progres Cetak STTPP Teregristrasi

Tabel 5. Jumlah STTPP Teregistrasi yang Terbit

NO	TAHUN	JUMLAH STTPP TERBIT
1	2011	526
2	2012	484
3	2013	5.577
4	2014	5.391
5	2015	2.494
6	2016	7.572
7	2017	15.899
8	2018	5.245
	TOTAL	43.188



Grafik 7. Persentase Kenaikan Penerima STTPP Teregistrasi per Tahun

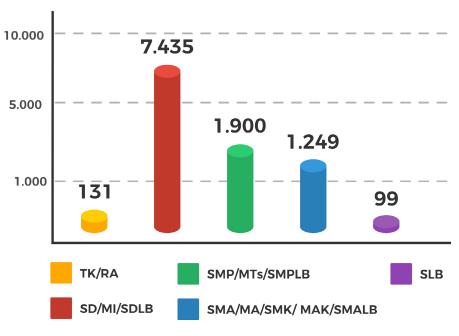


Kepala Sekolah dengan STTPP Teregistrasi

Tabel 6. Kepala Sekolah dengan STTPP Teregistrasi berdasarkan Jenjang Sekolah

NO	JENJANG SEKOLAH	JUMLAH
1	TK/RA	131
2	SD/MI/SDLB	7.435
3	SMP/MTs/SMPLB	1.900
4	SMA/MA/SMK/MAK/SMALB	1.249
5	SLB	99
	TOTAL	10.814

Keterangan : Kepala sekolah tersebut yang memperbarui data sebagai kepala sekolah ke LPPKS



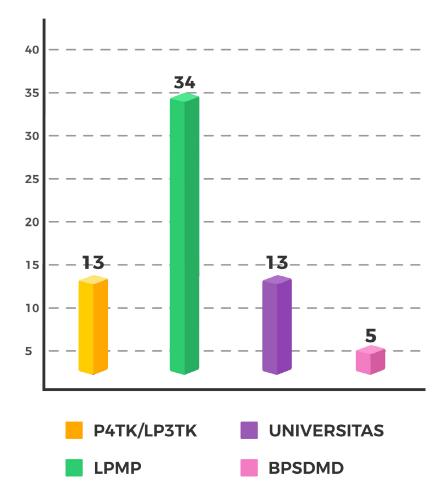
Grafik 8. Kepala Sekolah dengan STTPP Teregistrasi berdasarkan Jenjang Sekolah



Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD)

Tabel 7. Nama dan Jumlah Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD)

NO	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	P4TK/LP3TK	13	
2	LPMP	34	
3	Universitas	13	FKIP Universitas Sebelas Maret (FKIP UNS)
			Universitas Negeri Surabaya (UNESA)
			Universitas Negeri Semarang (UNNES)
			Universitas Negeri Malang (UNM)
			Universitas Negeri Gorontalo
			Universitas Bengkulu
			Universitas Negeri Jakarta
			Universitas Negeri Yogyakarta
			Universitas Negeri Padang
			Universitas Pendidikan Indonesia
			Universitas Negeri Makasar
			Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
			Universitas Ibnu Khaldun
			Sumatera Selatan
4	BPSDMD	5	Sumatera Utara
			DKI Jakarta
			Provinsi Jawa Barat
			Provinsi Banten
	TOTAL	65	



Grafik 9. Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD)

Sebaran STTPP Teregistrasi di Wilayah Provinsi

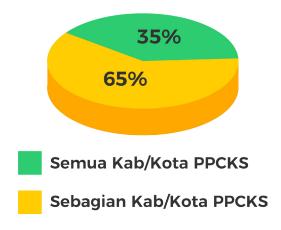
A. Perbandingan Sebaran STTPP Teregistrasi di Wilayah Provinsi

Tabel 8. Perbandingan Sebaran STTPP Teregistrasi di Wilayah Provinsi

NO	KETERANGAN KAB/KOTA PPCKS	JUMLAH
1	Semua PPCKS	12
2	Sebagian PPCKS	22
	TOTAL	34

^{*}Semua PPCKS = Semua Kabupaten/Kota di provinsi tersebut sudah melaksanakan program PPCKS

^{*}Sebagian PPCKS = Sebagian Kabupaten/Kota di provinsi tersebut sudah melaksanakan program PPCKS



Grafik 10. Persentase Perbandingan Sebaran STTPP Teregistrasi di Wilayah Provinsi

B. Provinsi dengan sebaran STTPP Teregistrasi di semua Kabupaten/Kota

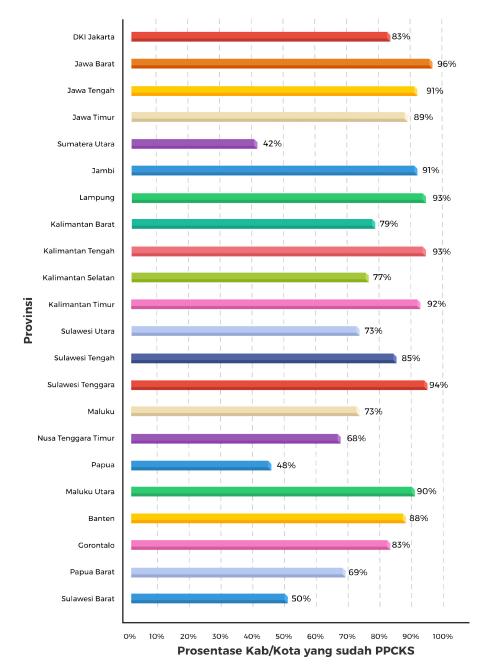
Tabel 9. Provinsi dengan sebaran STTPP Teregistrasi di semua Kabupaten/Kota

NO	NAMA PROVINSI	JUMLAH KAB/KOTA
1	Nangroe Aceh Darussalam	23
2	Bali	9
3	Bengkulu	10
4	DI Yogyakarta	5
5	Bangka Belitung	7
6	Kalimantan Utara	3
7	Kepulauan Riau	7
8	Nusa Tenggara Barat	10
9	Riau	12
10	Sulawesi Selatan	24
11	Sumatera Barat	19
12	Sumatera Selatan	17
	TOTAL	146

C. Provinsi yang Sebagian Kabupaten/Kota yang telah mengikuti Program Penguatan Calon Kepala Sekolah (PPCKS)

Tabel 10. Provinsi yang Sebagian Kabupaten/Kota yang telah mengikuti Program Penguatan Calon Kepala Sekolah (PPCKS)

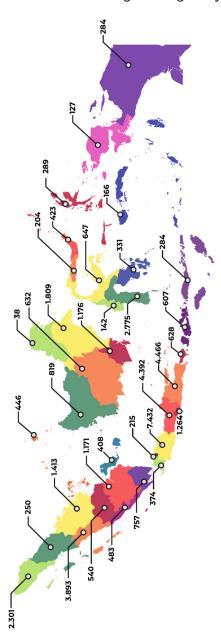
NO	NAMA PROVINSI	TOTAL	JUMLAH KAB/KOTA YANG SUDAH PPCKS
1	DKI Jakarta	6	5
2	Jawa Barat	27	26
3	Jawa Tengah	35	32
4	Jawa Timur	38	34
5	Sumatera Utara	33	14
6	Jambi	11	10
7	Lampung	15	14
8	Kalimantan Barat	14	11
9	Kalimantan Tengah	14	13
10	Kalimantan Selatan	13	10
11	Kalimantan Timur	12	11
12	Sulawesi Utara	15	11
13	Sulawesi Tengah	13	11
14	Sulawesi Tenggara	17	16
15	Maluku	11	8
16	Nusa Tenggara Timur	22	15
17	Papua	29	14
18	Maluku Utara	10	9
19	Banten	8	7
20	Gorontalo	6	5
21	Papua Barat	13	9
22	Sulawesi Barat	6	3
	TOTAL	368	288



Grafik 11. Persentase Kabupaten/Kota yang telah mengikuti PPCKS

D. Jumlah STTPP di masing-masing wilayah provinsi

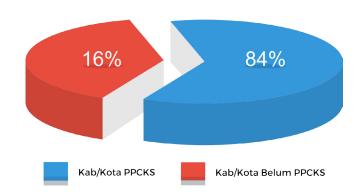
Infografis 1. Jumlah STTPP di masing-masing wilayah provinsi



E. Perbandingan sebaran STTPP Teregistrasi di Kabupaten/ Kota

Tabel 11. Perbandingan sebaran STTPP Teregistrasi di Kabupaten/ Kota

NO	KETERANGAN KAB/KOTA PPCKS	JUMLAH
1	Kab/Kota PPCKS	434
2	Kab/Kota Belum PPCKS	80
	TOTAL	514



Grafik 12. Persentase Perbandingan sebaran STTPP Teregistrasi di Kabupaten/Kota

Asesor Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (PPCKS)

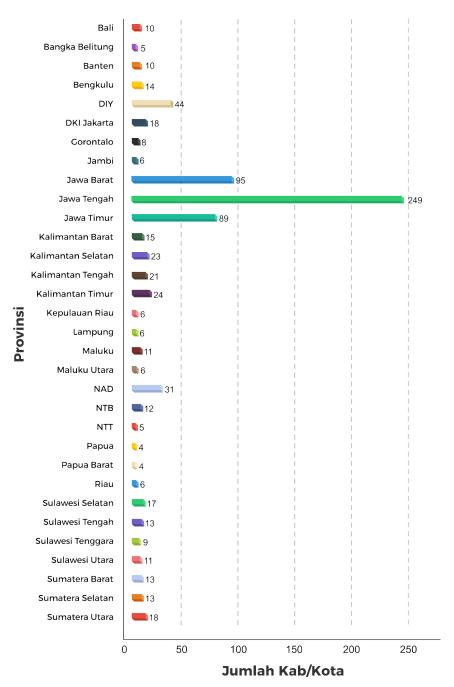


A. Sebaran Asesor Berdasarkan Wilayah

Tabel 12. Sebaran Asesor Berdasarkan Wilayah

NO	NAMA PROVINSI	JUMLAH KAB/KOTA
1	Bali	10
2	Bangka Belitung	5
3	Banten	10
4	Bengkulu	14
5	DIY	44
6	DKI Jakarta	18
7	Gorontalo	8
8	Jambi	6
9	Jawa Barat	95
10	Jawa Tengah	249
11	Jawa Timur	89
12	Kalimantan Barat	15
13	Kalimantan Selatan	23
14	Kalimantan Tengah	21
15	Kalimantan Timur	24
16	Kepulauan Riau	6
17	Lampung	6
18	Maluku	11
19	Maluku Utara	6
20	NAD	31
21	NTB	12
22	NTT	5
23	Papua	4
24	Papua Barat	4

25	Riau	6
26	Sulawesi Selatan	17
27	Sulawesi Tengah	13
28	Sulawesi Tenggara	9
29	Sulawesi Utara	11
30	Sumatera Barat	13
31	Sumatera Selatan	13
32	Sumatera Utara	18
	TOTAL	816

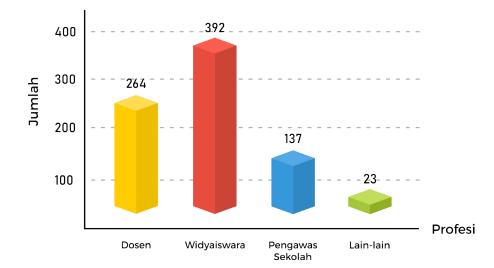


Grafik 13. Sebaran Asesor Berdasarkan Wilayah

B. Sebaran Asesor Berdasarkan Profesi

Tabel 13. Sebaran Asesor Berdasarkan Profesi

NO	PROFESI	JUMLAH
1	Dosen	264
2	Widyaiswara	392
3	Pengawas Sekolah	137
4	Lain-Lain	23
	TOTAL	816



Grafik 14. Sebaran Asesor Berdasarkan Profesi

Pengajar Diklat Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (PPCKS)

A. Sebaran Pengajar Diklat PPCKS Berdasarkan Wilayah

Tabel 14. Sebaran Pengajar Diklat PPCKS Berdasarkan Wilayah

NO	WILAYAH	JUMLAH
1	Aceh	37
2	Bali	9
3	Banten	14
4	Bengkulu	27
5	DI Yogyakarta	60
6	DKI Jakarta	25
7	Gorontalo	15
8	Jambi	9
9	Jawa Barat	121
10	Jawa Tengah	265
11	Jawa Timur	132
12	Kalimantan Barat	25
13	Kalimantan Selatan	31
14	Kalimantan Tengah	41
15	Kalimantan Timur	22
16	Kalimantan Utara	1
17	Kepulauan Bangka Belitung	13
18	Kepulauan Riau	11
19	Lampung	13
20	Maluku	16
21	Maluku Utara	12
22	Nusa Tenggara Barat	25
23	Nusa Tenggara Timur	18
24	Papua	3
25	Papua Barat	14
26	Riau	9

27	Sulawesi Selatan	38
28	Sulawesi Tengah	18
29	Sulawesi Tenggara	15
30	Sulawesi Utara	16
31	Sulawesi Barat	0
32	Sumatera Barat	22
33	Sumatera Selatan	45
34	Sumatera Utara	34
	TOTAL	1.156

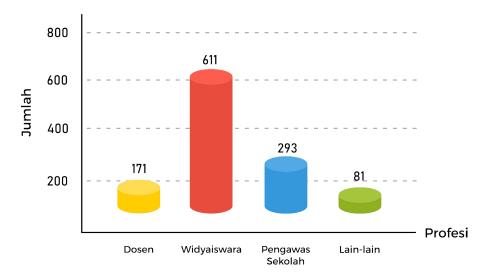
Aceh Bali **9** Banten Bengkulu DI Yogyakarta DKI Jakarta Gorontalo Jambi Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur 22 Kalimantan Utara Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau Wilayah Lampung **1**3 Maluku **1**6 Maluku Utara Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua **3** Papua Barat **9** Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara **1**5 Sulawesi Utara Sulawesi Barat 0 Sumatera Barat Sumatera Selatan Sumatera Utara 0 50 100 150 200 250 Jumlah

Grafik 15. Sebaran Pengajar Diklat PPCKS Berdasarkan Wilayah

B. Sebaran Pengajar Diklat Berdasarkan Profesi

Tabel 15. Sebaran Pengajar Diklat Berdasarkan Profesi

NO	PROFESI	JUMLAH
1	Dosen	171
2	Widyaiswara	611
3	Pengawas Sekolah	293
4	Lain-lain	81
	TOTAL	1.156

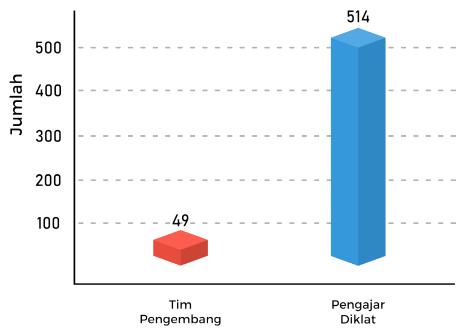


Grafik 16. Sebaran Pengajar Diklat Berdasarkan Profesi

Pengajar Diklat Program Penguatan Kepala Sekolah

A. Sebaran Pengajar Diklat Program Penguatan Kepala Sekolah



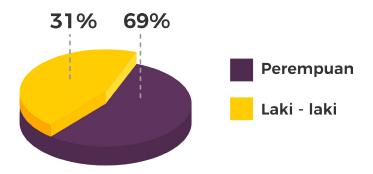


Grafik 17. Sebaran Pengajar Diklat Program Penguatan Kepala Sekolah

a. Sebaran Pengajar Diklat Program Penguatan Kepala Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 16. Sebaran Pengajar Diklat Program Penguatan Kepala Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-Laki	387
2	Perempuan	176
	TOTAL	563

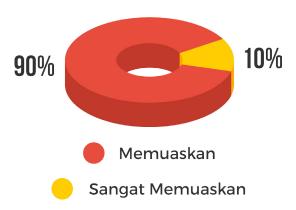


Grafik 18. Persentase Sebaran Pengajar Diklat Program Penguatan Kepala Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin

b. Sebaran Pengajar Diklat Hasil ToT Program Penguatan Kepala Sekolah Berdasarkan Kriteria

Tabel 17. Sebaran Pengajar Diklat Hasil ToT Program Penguatan Kepala Sekolah Berdasarkan Kriteria

NO	KRITERIA	JUMLAH
1	Sangat memuaskan	49
2	Memuaskan	465
	TOTAL	514

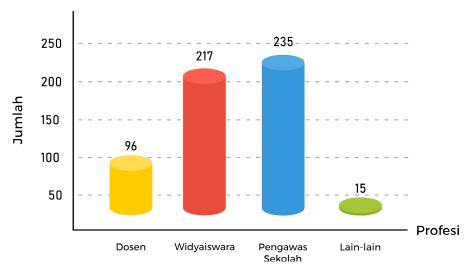


Grafik 19. Persentase Sebaran Pengajar Diklat Hasil ToT Program Penguatan Kepala Sekolah Berdasarkan Kriteria

B. Sebaran Pengajar Diklat Penguatan Kepala Sekolah Berdasarkan Profesi

Tabel 18. Sebaran Pengajar Diklat Penguatan Kepala Sekolah Berdasarkan Profesi

NO	PROFESI	JUMLAH
1	Dosen	96
2	Widyaiswara	217
3	Pengawas Sekolah	235
4	Lain-lain	15
	TOTAL	563



Grafik 20. Sebaran Pengajar Diklat Berdasarkan Profesi



A. PP 19/2017 tentang Perubahan PP 74/2008 tentang Guru

Infografis 2. PP 19/2017 tentang Perubahan PP 74/2008 tentang Guru

Pasal 15 ayat (1) Tunjangan Profesi diberikan kepada :

- Guru:
- Guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan; atau
- Guru yang mendapat tugas tambahan.

Pasal 54 Ayat (1) dan ayat (2)

- Beban kerja kepala satuan pendidikan sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan jiwa kewirausahaan, dan supervisi kepala Guru dan tenaga kependidikan.
- Dalam keadaan tertentu selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala satuan pendidikan dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan untuk memenuhi kebutuhan Guru pada satuan pendidikan.

Pemenuhan Beban Kerja

 Beban kerja kepala satuan pendidikan yang ekuivalen diatur dalam Permendikbud tentang Pemenuhan Beban Kerja.

B. Syarat Guru untuk menjadi Kepala Sekolah

Infografis 3. Syarat Guru untuk menjadi Kepala Sekolah

SYARAT GURU UNTUK MENJADI KEPALA SEKOLAH



Svarat Umum

- Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana S-1 atau diploma empat(D-IV)
 dari perguruan diri dan atau program studi yang terakreditasi paling rendah B:
- **b** Memiliki sertifikat pendidik
- Memiliki peringkat paling rendah Penata, golongan ruang III / c bagi PNS
- Pengalaman mengajar paling sedikit 6 tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali TK/PLB paling singkat 3 tahun
- Selama 2 (dua) tahun terakhir memiliki hasil penilaian prestasi kerja dengan sebutan paling rendah 'baik':
- Memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun untuk:

C. Penyiapan Calon Kepala Sekolah

Infografis 4. Penyiapan Calon Kepala Sekolah

Penyiapan Calon Kepala Sekolah Yang diselenggarakan oleh Pemda dan untuk daerah khusus

Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten/Kota

Berdasarkan data proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah untuk 5(lima) tahun yang akan datang yang diperinci setiap 1(satu) tahun.

Proyeksi berdasarkan jumlah kepala sekolah yang akan pensiun dan hasil penilaian kinerja KS dibawah baik



Seleksi bakal calon

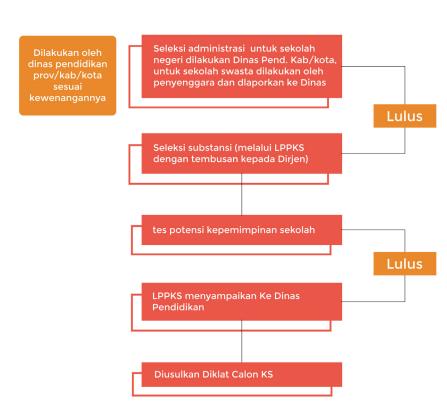
Pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah

D. Seleksi Calon Kepala Sekolah

Infografis 5. Seleksi Calon Kepala Sekolah

Seleksi Calon Kepala Sekolah

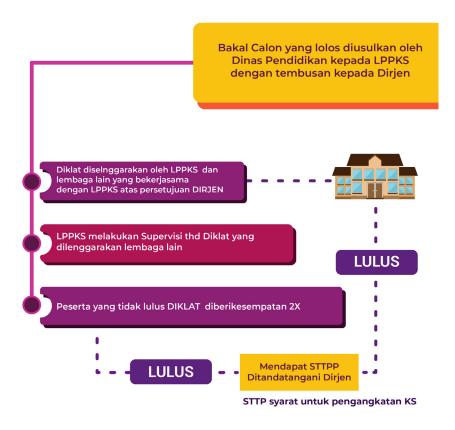




E. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah

Infografis 6. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah

Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah



Diklat dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

F. Proses Pengangkatan Kepala Sekolah

Infografis 7. Proses Pengangkatan Kepala Sekolah

Proses Pengangkatan Kepala Sekolah



G. Alur PPCKS

Infografis 8. Alur Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (PPCKS) **ALUR PPCKS** Permendikbud No. 6 Tahun 2018 Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah MULAI Berdasarkan data proyeksi Usulan Peserta dilakukan melalui Seleksi Administrasi dilakukan kebutuhan KS untuk 5(lima) tahun pengumuman, identifikasi guru melalui penilaian kelengkapan yang akan datang yang deperinci potensial, penyiapan berkas dokumen sebagai bukti bahwa setiap 1 (satu) tahun. Jika usulan dan pengajuan usul Calon calon KS telah memenuhi diselenggarakan oleh Pemda dan Kepala Sekolah. Guru yang persyaratan sesuai Permendikbua untuk derah khusus, proyeksi potensial dapat diusulkan kepada No. 6 Tahun 2018 Bab 2 Pasal 2 LAYAK dilakukan Dinas Pendidikan dinas Provinsi/ Kabupaten Kota Kabupaten/Kota berdasarkan oleh Kepala Sekolah atau bersama jumlah KS yang akan pensiun dan jumlah KS dengan hasil penilaian kinerja dibawah baik Analisis Istrumen AKPK dan Merupakan kegiatan pemberian Perencanaan Diklat pengalaman pembelajaran secara teoritik maupun praktik. Ditetapkan oleh Pejabat Pembina bertujuan untuk Kepegawaian, terdiri atas unsur menumbuhkembangkan YA sekretariat daerah,Dinas pengetahuan, sikap dan Pendidikan Provinsi. keterampilan pada dimensi Kabupaten/Kota sesuai dengan dimensi kompetensi, kepribadian, kewenangannya, Dewan manajerial, kewirausahaan, **TIDAK** Pendidikan dan Pengawas Sekolah supervisi, dan sosial, Dilaksanakan

LPPKS dan Lembaga lain yang

bekerja sama dengan

persetujuan Dirjen Guru dan

Tenaga Kependidikan(GTK)

dalam kegiatan tatap muka dalam

kurun waktu minimal 100 jam dan

praktik pengalaman lapangan

dalam kurun waktu minimal

selama 3 (tiga) bulan atau

ekuivalen dengan 200 jam, 150 JP di

sekolah sendiri dan 50 JP disekolah lain. Pola Diklat CKS adalah In-On-

In: In Service Learning I, On The Job

Learning dan In Service Learning 2.

Pemerolehan STTPP ditandatangani Dirien GTK



Dilakukan melalui penilaian



Penilaian

Potensi Kepemimpinan

Menggunakan empat instrumen

yang menilai potensi

kepemimpinan CKS dalam berfikir

taktis kritis kreatif dan sistematis

H. Penugasan Kepala Sekolah

Infografis 9. Penugasan Kepala Sekolah

Penugasan Kepala Sekolah

PENUGASAN PERTAMA

- Penugasan KS dengan Periodisasi
- Periodisasi tugas 4 tahun



Dapat diperpanjang sampai 3 periode, untuk periode ke 4 harus melalui Uii Kompetensi

Kembali menjadi Guru/Jabatan lain



PENUGASAN BERIKUTNYA

2

Dilakukan evaluasi pada akhir tahun kedua dengan predikat minimal Baik



PENUGASAN BERLANJUT

3

- Guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah berpindah antar sekolah jenjang yang sama berdasarkan proyeksi kebutuhan
- Mutasi setelah 2 tahun



I. Tugas Pokok Kepala Sekolah

Infografis 10. Tugas Pokok Kepala Sekolah

Pengembangan Jiwa Kewirausahaan



- 1. Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah
- 2. Menerapkan kepemimpinan dalam mencapai keberhasilan sekolah sebaga organisasi pembelajar yang efektif
- 3. Memotivasi guru dan tenaga kependidikan untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
- 4. Memotivasi peserta didik
- 5. Mengembangkan pengelolaan kegiatan produksi sekolah sebagai sumber belajar peserta didik.



Supervisi

- 1. Merencanakan program supervisi
- 2. Melaksanakan program supervisi
- 3. Menindaklanjuti program supervisi

Manajerial



- 2. Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah
- 3. Memimpin sekolah/madrasah
- 4. Mengelola perubahan dan pengembangan, pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sekolah/madrasah
- 5. Menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik
- 6. Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia
- 7. Mengelola sarana dan prasaran sekolah
- 8. Mengelola hubungan sekolah dan masyarakat
- 9. Mengelola peserta didik
- 10. Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran
- 11. Mengelola keuangan sekolah
- 12. Mengelola ketatausahaan sekolah
- 13. Mengelola unit layanan khusus sekolah
- 14. Mengelola sistem informasi sekolah
- 15. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah
- 16. Mewujudkan peningkatan kinerja sekolah
- 17. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan





- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 212/P/2018 Tentang Penugasan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah untuk Melaksanakan Penyiapan, Pengembangan, dan Pemberdayaan Pengawas Sekolah
- Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19732/B. B1.3/HK/2018 Tentang Penetapan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bagi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang Bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah
- Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23195/B. b13/Hk/2018 Tentang Penetapan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang Bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah Tahap 2
- Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19998/B. B1.3/GT/2018 Tentang Tata Kelola Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
- Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18356 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN **KEPALA SEKOLAH (LPPKS)**

Kp. Dadapan RT. 006/RW. 007, Ds. Jatikuwung, Kec. Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah Telp. +62 271 8502888 Fax. +62 271 8502000 E-mail: lppks@kemdikbud.go.id

Cari kami di









Ippks.kemdikbud







